



**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN
JEMBER PERIODE TAHUN 2013-2014
(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum)**

SKRIPSI

Oleh:

NOVIANTI DIANING RISMA

100210301066

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN
JEMBER PERIODE TAHUN 2013-2014
(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

NOVIANTI DIANING RISMA

100210301066

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua saya Ayah dan Mama tercinta, terimakasih untuk semua yang beliau lakukan padaku, berkat doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini hingga saya akhirnya dapat menyelesaikan studi;
2. Dosen-dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi, saya banyak mengucapkan terimakasih atas doa dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Almamaterku Universitas Negeri Jember, saya ucapkan terimakasih selama masa studi telah memberikan saya banyak ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan saya di masa kini hingga mendatang;

MOTTO

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah
(Terjemahan Surat Al-Insyirah Ayat 6-8)*)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman
yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.
(Andrew Jackson)**)

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 2001. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
Semarang: CV. ALWAAH

***) Andrew Jackson

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianti Dianing Risma

NIM : 100210301066

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember Periode Tahun 2013-2014 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Maret 2015

Yang menyatakan,

Novianti Dianing Risma
NIM 100210301066

PERSETUJUAN

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN
JEMBER PERIODE TAHUN 2013-2014
(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Nama : Novianti Dianing Risma
Nomor Induk Mahasiswa : 100210301066
Tahun Angkatan : 2010
Jurusan/Program Studi : P. IPS/P. Ekonomi
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 31 Oktober 1991

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Drs. Pudjo Suharso, M. Si
NIP. 19591116 198601 1 001

Drs. Djoko Widodo, M.M
NIP. 19600217 198603 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember Periode Tahun 2013-2014 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum)**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 23 Maret 2015

Jam : 09.00 - selesai

Tempat : Gedung I FKIP Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Pudjo Suharso, M. Si
NIP. 19591116 198601 1 001

Drs. Djoko Widodo, M.M
NIP. 19600217 198603 1 003

Anggota I,

Anggota II,

Hety Mustika Ani, SPd, M.Pd
NIP. 19800827 200604 2 001

Drs. Umar HMS, M.Si
NIP. 19621231 198802 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember Periode Tahun 2013-2014 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum), Novianti Dianing Risma, 100210301066, 60 hlm, Progam Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pada dasarnya banyak hal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, diantaranya yaitu Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Dimana penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam suatu pemilik usaha. Begitu halnya pada pemerintah daerah seperti di Jember. Penyerapan tenaga kerja yang ada pada suatu daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja salah satunya yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten Jember. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode *purposive area*. Jenis dan sumber data menggunakan data yang digunakan yakni 1) menurut sifatnya yaitu data kuantitatif, 2) menurut cara memperolehnya yaitu data sekunder (*secondary data*), 3) menurut pengumpulannya yaitu Data berkala (*time series data*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur. Analisis data yang akan digunakan yaitu

analisis deskriptif dan analisis inferensial (yang terdiri: analisis garis regresi sederhana, analisis varian garis regresi, uji F, dan efektifitas garis regresi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (studi kasus pada dinas pekerjaan umum). Hasil pengolahan data dibuktikan dengan menggunakan uji $F_{hitung} = 110,094 > F_{tabel} = 4,196$ dengan tingkat signifikansi $F = 0,000 < \alpha = 0,05$. dan koefisien determinasi (R_{square}) sebesar 79,7%. sedangkan sisanya yaitu 20,3% dipengaruhi variabel bebas lainnya yang tidak diteliti yaitu, upah, nilai produksi, dan nilai investasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk peningkatan jalan di Kota Jember, maka penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi. Dimana jumlah penyerapan tenaga kerja berkisar antara 10-22 orang tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan Pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan anggaran yang akan dialokasikan untuk melakukan kegiatan peningkatan jalan, diharapkan kontrak kerja yang diberikan mampu memberikan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan dapat lebih meningkatkan dan mengevaluasi kinerja dari rekanan yang telah dipercayakan, diharapkan kontrak kerja yang telah diberikan dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember Periode Tahun 2013-2014” (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum). Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Drs. Pudjo Suharso, M. Si selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Djoko Widodo, M.M selaku Dosen Pembimbing II, Hety Mustika Ani, S.Pd, M.Pd selaku Penguji 1, Drs. Umar HMS, M.Si selaku Penguji II , serta Almarhum Prof.Dr. Bambang Hari P,MA;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan, Bapak Sujarwo,ST yang menjadi informan turut membantu dalam pengumpulan data skripsi ini;
6. Sahabat-sahabatku Iva, Ida dan Rini terimakasih untuk kebersamaan, kekompakan, dan dukungan selama ini;

7. Teman-teman PE angkatan 2010 yang selalu bersama-sama selama masa perkuliahan, terimakasih untuk kebersamaan dan saat-saat terindah bersama kalian;
8. Pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. akhirnya, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 23 Maret 2015

Novianti Dianing Risma

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi.....	4
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.3 Konsep Otonomi Daerah	10
2.1.4 Pengembangan Prasarana Daerah	12
2.1.5 Keuangan Daerah.....	14
2.1.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	16

2.1.7 Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	19
2.1.8 Pendapatan Asli Daerah	20
2.1.9 Penyerapan Tenaga Kerja	23
2.1.10 Pengaruh Alokasi APBD (Pengeluaran Pemerintah) dengan Penyerapan Tenaga Kerja	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Konseptual.....	27
2.4 Hipotesis	28
BAB 3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Rancangan Penelitian.....	29
3.2 Unit Analisis.....	29
3.3 Daerah Penelitian.....	29
3.4 Definisi Operasional Variabel Dan Rencana Penelitian	30
3.5 Jenis Dan Sumber Data	30
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.7 Metode Analisis Data	31
3.7.1 Analisis Deskriptif	31
3.7.2 Analisis Inferensial	32
a. Persamaan Garis Regresi Sederhana.....	32
b. Analisis Varian Garis Regresi	33
c. Uji F	33
b. Efektifitas Garis Regresi	35
BAB 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	36
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Jember.....	36
4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Jember	39
4.1.3 Penduduk	40
4.1.3.1 Pekerjaan Penduduk.....	41
4.1.3.2 Pendidikan Penduduk	42

4.1.4 Perekonomian	43
4.2 Analisis Data	45
4.2.1 Analisis Deskriptif	45
A. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	45
B. Penyerapan Tenaga Kerja	47
4.2.2 Analisis Inferensial	50
A. Analisis Garis Regresi Sederhana	50
B. Analisis Varian Garis Regresi	51
C. Uji F	52
D. Koefisien Determinasi (R^2)	53
4.3 Pembahasan	53
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR BACAAN	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	33
Tabel 4.1 Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng	37
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2014 (jiwa)	41
Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Lebih Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Di Kabupaten Jember Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2014 (jiwa)	42
Tabel 4.4 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Dan Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Di Kabupaten Jember Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 (jiwa)	43
Tabel 4.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012	44
Tabel 4.6 Hasil Analisis Garis Regresi Sederhana	50
Tabel 4.7 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	52
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil SPSS Untuk Uji F	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Teori Pertumbuhan Schumpeter	6
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	28
Gambar 4.1 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2013	48
Gambar 4.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2014	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matrik Penelitian	61
B. Hasil Data Sekunder	62
C. Daftar Kegiatan Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2013-2014.....	64
D. Hasil Analisis	65
E. Tabel Nilai-nilai Kritis F.....	70
F. Surat Ijin Observasi.....	73
G. Surat Ijin Penelitian	74
H. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	77
I. Lembar Konsultasi Bimbingan	78
J. Daftar Riwayat Hidup.....	81
K. Dokumentasi	82

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan suatu usaha, untuk meningkatkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang berarti tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu tahun tertentu. Melakukan perombakan dan modernisasi dalam struktur perekonomian yang pada umumnya masih bercorak tradisional (dominasi sektor pertanian).

Salah satu indikasi pembangunan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup suatu bangsa yang ditunjukkan dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang direalisasikan dalam pembangunan daerah, yang terutama ditekankan pada upaya peningkatan daya guna dari hasil guna pembangunan sektoral di daerah agar benar-benar disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah.

Menurut Iwan (1994: 97) kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) secara sektoral maupun perkapita. Oleh karena itu PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa terhadap pemilik faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah tersebut.

Salah satu kabupaten yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan pendapatan adalah Kabupaten Jember. Pada tahun 2013, pendapatan Kabupaten Jember mencapai 2.266.304.287.001,31 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp 2.667.046.916.473,00 (APBD Kabupaten Jember, 2014). Hal ini menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat sehingga tercipta kesempatan kerja yang tinggi. Peningkatan pendapatan akan diikuti dengan pembangunan prasarana wilayah. Prasarana wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perwilayahan dan tata ruang, maupun struktur pelayanan dan kegiatan (baik itu internal wilayah maupun

keterkaitannya dengan eksternal wilayah). Tingkat kegunaannya dicerminkan dengan saling mempengaruhi antara perwilayahan dan keberadaan infrastruktur salah satunya jalan. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember mencapai 2.646.615.000 pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 2.769.603.000 (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember, 2014).

Hal ini menampakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Jember. Dengan adanya penambahan panjang jalan pada daerah-daerah baru seperti peningkatan Jalan Perbatasan Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan tahun 2013 dan peningkatan Jalan Sunan Kalijogo Barat Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan pada tahun 2014 akan membuka peluang para investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di daerah tersebut seperti pembuatan pabrik baru. Secara tidak langsung hal tersebut dapat menyerap tenaga kerja sekitar daerah tersebut. Dengan melakukan cara tersebut diharapkan tingkat pengangguran di Kabupaten Jember menurun setiap tahunnya. Sedangkan dengan adanya pembangunan jalan, dapat terserap tenaga kerja 387 orang pada tahun 2013 - 2014 (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember Periode Tahun 2013-2014” (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang ditemui adalah adakah pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum terhadap terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember
- b. Menjadi bahan referensi dan kajian bagi upaya penelitian yang lebih mendalam dan komperhensif terhadap masalah pengembangan potensi ekonomi daerah khususnya daerah Kabupaten Jember.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi daerah Kabupaten Jember dan kabupaten lain pada umumnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Dalam satu negara, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan hal pokok yang harus dipenuhi. Arsyad (1999: 46) menyebutkan ada beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan yaitu:

a. Mahzab Historismus

Mahzab Historismus melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan sejarah dengan kajian yang bersifat induktif empiris. Ada beberapa ahli yang tergabung dalam mahzab Historismus diantaranya:

1. Friedrich List

List memandang bahwa perkembangan ekonomi melalui 5 tahap primitif yaitu peternakan, pertanian, perikanan dan industri pengolahan, dan industri pengolahan serta perdagangan.

2. Bruno Hildebrand

Dalam pemikiran Bruno, perkembangan ekonomi bukan berdasarkan cara produksi maupun cara konsumsi tetapi pada cara distribusi. Bruno mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu perekonomian *barter cultural*, perekonomian uang dan perekonomian kredit.

3. Karl Bucher

Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap yaitu produksi untuk sendiri (subsistem), perekonomian kota dan perekonomian nasional. Pendapat ini merupakan sintesa dari pendapat Friedrich List dan Bruno Hildebrand.

4. Walt Whiteman Rostaw

Menurut Rostaw, proses pembangunan ekonomi dibagi dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan konsumsi tinggi.

b. Mahzab Klasik

1. Adam Smith

Menurut Adam Smith, ada 2 aspek utama dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok barang modal) dan pertumbuhan penduduk.

2. David Ricardo

David Ricardo mengungkapkan, peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja artinya dapat memperlancar bekerjanya *the law of diminishing return* yang menurunkan tingkat hidup.

3. Teori Solow-Swan

Menurut teori Neo Klasik (Solow-Swan) ini (dalam Arsyad, 1999: 61) pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio*) bisa berubah atau bersifat dinamis. Artinya untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan besarnya modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam

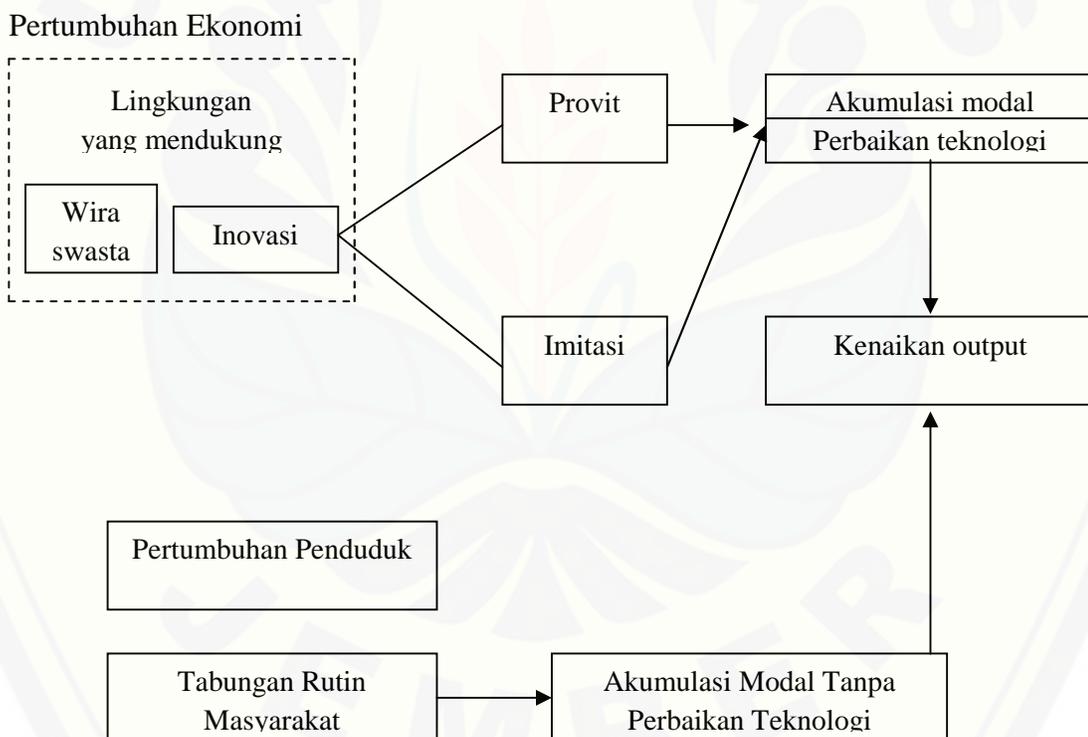
menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

c. Mahzab Keynesian

Mahzab Keynesian diwakili oleh teori pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam teorinya, Harrod-Domar menyebutkan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pesat dengan adanya investasi-investasi baru sebagai tambahan modal.

d. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inovasi dan investor (wirausaha) dengan diperkenalkan teknologi baru. Secara sistematis pertumbuhan ekonomi menurut Shumpeter pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Teori Pertumbuhan Schumpeter

e. Pendekatan Strukturalisme

Dasar pandang penulis dalam ekonomi pembangunan termasuk alur pemikiran strukturalis yang sudah terlihat dari ulasan yang disajikan sebelumnya. Proses

pembangunan dilihat sebagai transisi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh transformasi yang bersifat multi-dimensional yaitu suatu transisi dari kontelasi ekonomi (kerangka susunan tertentu dalam keadaan ekonomi) yang mengalami stagnasi ke arah perimbangan-perimbangan keadaan yang sudah mengandung gerak kekuatan dinamika dalam perkembangannya. Transformasi multidimensional mencakup perubahan dan perimbangan-perimbangan keadaan yang ditahap awal (stagnasi) melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan tata susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, atau secara singkat perubahan pada struktur ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi sebagai proses transisi dan transformasi berkisar pada perubahan struktural. Perubahan struktural menyangkut perubahan-perubahan pada struktur dan komposisi produk nasional, pada kesempatan kerja yang produktif pada ketimpangan antar sektoral, antar daerah, dan antar golongan masyarakat, pada kemiskinan dan kesenjangan antara golongan berpendapatan rendah dan tinggi. Segala sesuatunya menjadi segi-segi utama pada pendekatan teoretis dalam ekonomi pembangunan dan dalam model-model tentang pembangunan.

Perubahan-perubahan pada ciri-ciri pokok dalam suatu struktur ekonomi berkaitan dengan perkembangan (kenaikan) tingkat pendapatan. Pengalaman empiris membuktikan (Simon Kuznets), dengan meningkatnya pendapatan terjadi pergeseran-pergeseran pada komposisi produk nasional (pergeseran diantara sumbangan sektoral-primer, sekunder, tersier-terhadap produk nasional), pada kesempatan kerja produktif (dari sektor primer beralih pada sektor sekunder dan sektor tersier) dan pola perdagangan (dari komoditi primer ke barang manufaktur dan pemberian jasa). Pokok permasalahan berkisar pada daya upaya untuk mewujudkan gerak kegiatan yang menambah secara kontinyu pendapatan nasional maupun pendapatan perkapita. Hal ini sebagai pendekatan pertama yang mencerminkan peningkatan taraf hidup rata-rata dalam masyarakat.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada.

Kuznets dalam Prassman (2000: 77) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu:

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada.

Menurut Schumpeter dalam Prassman (2000: 155) pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada suatu saat akan mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut, kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005: 28).

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan PDRB per tahun menurut harga konstan, yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut (Sukirno, 1996: 33):

$$\text{Pertumbuhan Ek}_{(\text{per tahun})} = \frac{\text{PDRB}_{(t)} - \text{PDRB}_{(t-1)}}{\text{PDRB}_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{PDRB}_{(t)}$ = PDRB tahun ke-t

$\text{PDRB}_{(t-1)}$ = adalah PDRB tahun ke (t-1)

Penggunaan data pertumbuhan ekonomi dalam harga berlaku dengan alasan bahwa data dalam desentralisasi fiskal yang meliputi: pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun realisasi total pengeluaran pemerintah daerah adalah dalam harga berlaku (Mursinto, 2004).

2.1.3 Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang dirumuskan sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan konsep daerah otonom dalam Undang-undang dirumuskan sebagai berikut “Daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 32 Tahun 2004: 4).

Kewenangan otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah berwujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004: 4).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memiliki makna yang berbeda dengan otonomi daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974.

Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi sendiri. Sendi-sendi tersebut adalah:

a. *Sharing of Power* (Pembagian Kewenangan)

Dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah UU No. 22 tahun 1999 menggunakan teori residu (teori sisa). Pemerintah pusat akan memegang tujuh kewenangan, kewenangan bidang politik, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama (Vide Pasal 7), konservasi, dan standarisasi Nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan kota meliputi kewenangan wajib dan kewenangan bukan wajib. Kewenangan wajib terdiri dari sebelas kewenangan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, penanaman, lingkungan hidup, pertamanan, koperasi, dan tenaga kerja.

b. *Distribution of Income* (Pemerataan Pendapatan)

Dalam pemerataan pendapatan ini, dilaksanakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999, yang mengenal empat model dalam pembagian pendapatan, yaitu:

1. 100 persen untuk pemerintah daerah dan 0 persen untuk pemerintah pusat. Ini berlaku untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan seluruh biaya yang berkaitan dengan tanah;
2. 80 persen untuk pusat dan 20 persen untuk daerah, ini berlaku untuk pertambangan minyak dan gas bumi;
3. 80 persen untuk pusat dan 20 persen untuk daerah, ini berlaku untuk pertambangan lainya selain petambangan minyak dan gas bumi;
4. 50 persen untuk pusat dan 50 persen untuk daerah. Ini berlaku untuk hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, minyak dan gas bumi.

Dana ini nantinya akan diratakan secara seimbang kepada daerah dalam bentuk dana alokasi khusus.

c. *Empowering* (Pemberdayaan)

Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, harus dilakukan pemberdayaan rakyat daerah. Pemberdayaan ini bertujuan untuk:

1. peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah;
2. peningkatan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat daerah.

Sehubungan dengan rakyat daerah diwakili oleh DPRD, maka DPRD inilah yang diberdayakan pertama kali.

2.1.4 Pengembangan Prasarana Wilayah

Prasarana wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perwilayahan dan tata ruang, maupun struktur pelayanan dan kegiatan (baik itu internal wilayah maupun keterkaitannya dengan eksternal wilayah). Tingkat urgensi ini dicerminkan dengan saling mempengaruhi antara perwilayahan dan keberadaan infrastruktur. Prasarana Wilayah terdiri atas: transportasi (darat, laut dan udara), irigasi (terkait dengan persediaan air dan sistem pengaliran irigasi), energi (listrik, gas), komunikasi (telepon, berkait dengan pengembangan dan sistem jaringan), tata air (drainase, dan air baku).

Untuk menunjang pemerataan pembangunan, peranan transportasi sangat dominan sebagai akses penghubung antar wilayah dan mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa. Adapun kajian transportasi ini terdiri atas transportasi darat, laut dan udara.

Transportasi darat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni jalan raya, kereta api dan penyeberangan. Jalan raya dalam hal ini akan terkait dengan: jaringan jalan, terminal penumpang, terminal kargo dan peti kemas; sedangkan kereta api mengkaji tentang jaringan dan tipe pelayanan.

Jaringan jalan memegang peran utama dalam mendorong pertumbuhan wilayah maupun pelayanan pergerakan barang dan manusia. Arahannya pengembangannya didasarkan atas orde kota, tingkat perkembangan kota, hubungan antar wilayah yang lebih luas. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan

sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum tersebut dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Jalan propinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis propinsi. Jalan strategis propinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan propinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan propinsi.

2.1.5 Keuangan Daerah

Keuangan daerah yang termuat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung pengertian semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam prinsip keuangan daerah terkandung unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok dalam keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai, serta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

Hak Daerah tersebut meliputi antara lain:

- a. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000);
- b. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000);
- c. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004);
- d. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;

- c. mencerdaskan kehidupan bangsa dan
- d. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran. Dari ketiga jenis pelimpahan wewenang tersebut, hanya pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber penerimaan APBD dan diadministrasikan serta dipertanggungjawabkan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah:

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD);
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB);
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau

output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Anggaran daerah memiliki beberapa fungsi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

b. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.7 Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Sejalan dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur pembagian kewenangan di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan daerah yang lebih besar, membawa konsekuensi pada perlunya pembagian sumber-sumber keuangan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penerimaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006).

Sumber penerimaan daerah tersebut adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan paling menonjol perannya terhadap pelaksanaan desentralisasi. Keadaan demikian menggambarkan bahwa sampai saat ini kemampuan keuangan daerah masih sangat tergantung dari alokasi dari pusat (*transfer*).

Dana perimbangan terdiri dari:

1. dana bagi hasil (bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak);
2. dana alokasi umum (terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum);
3. dana alokasi khusus (dirinci menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah).

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain bersumber dari:

1. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;
3. dana bagi hasil pajak dalam provinsi kepada kabupaten/kota;
4. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. PAD merupakan sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk membiayai peyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar PAD berarti bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan juga lebih baik, dan semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah maka bisa dikatakan daerah tersebut dikatakan mandiri.

Penerimaan daerah memang diharapkan dari PAD, sebagai penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD maka semakin tinggi kualitas otonominya. Kemudian jika ditinjau dari sudut kebijakan dalam penggunaan dana PAD merupakan pembiayaan yang paling memberikan otonomi pada daerah. Sedang Devas (1988: 260) mengemukakan bahwa pemerintah daerah akan dapat meningkatkan tingkat otonomi yang diinginkan yaitu kebebasan bertindak jika mereka sendiri yang mencari sebagian besar uang yang mereka perlukan dan mereka membelanjakan sendiri.

Sumber penerimaan PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006):

- a. Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMD adalah badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang dapat diadakan, diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi perusahaan dan ketentuan pokok perusahaan daerah ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan usaha Milik Negara (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam ketiga sumber PAD diatas adalah:

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

5. penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. pendapatan denda pajak;
9. pendapatan denda retribusi;
10. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. pendapatan dari pengembalian;
12. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan
14. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dinas-dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Sumber penerimaan PAD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai pungutan langsung yang digunakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah.

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran atau Penilaian PAD

Untuk meningkatkan kemandirian daerah maka pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran atau penilaian atas pungutan daerah.

b. Analisis Potensi PAD

Potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD.

Beberapa variabel yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD adalah:

a. Kondisi Awal suatu Daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial daerah sangatlah menentukan hal-hal berikut:

1. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu.
 2. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Peningkatan cakupan/eksistensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah (*product*) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, di suatu daerah (*region*) tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu. Dengan demikian PDRB menunjukkan *production originated* dari suatu daerah tertentu.

2.1.9 Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupu mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak Payaman,1985).

Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha, untuk dapat sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri. Menurut BPS penduduk berumur 10 keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

Banyak tenaga kerja yang tersedia tetapi tidak dapat diserap oleh industri hal ini dikarenakan keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, di sinilah perlunya peranan pemerintah untuk melakukan pendidikan atau pelatihan terhadap tenaga kerja agar memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri. Mengingat kesempatan kerja yang terbatas tersebut maka pemerintah mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang nantinya dapat menampung maupun mengurangi tingkat pengangguran yang berada di tengah masyarakat melalui penciptaan usaha usaha industri kecil.

Semakin bertambahnya jumlah industri kecil akan membawa dampak sangat luas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan SDM yang terbatas tentunya akan menghambat pengembangan itu sendiri, merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta berpartisipasi menunjang program pemerintah pada peningkatan taraf hidup yang lebih adil dan merata, lalu pemerintah memberikan bantuan dan penyuluhan.

Pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja maka akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. Dalam memahami mekanisme pasar tenaga kerja harus dilihat bagaimana individu pekerja terdapat perbedaan, maka untuk menentukan kuva penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah dengan menjumlahkan kurva-kurva penawaran dari setiap individu, oleh sebab itu kurva dari penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung kebelakang (*backward bending curve*).

2.1.10 Pengaruh Alokasi APBD (Pengeluaran Pemerintah) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Kunarjo (2002:144-146) Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran yang tak terduga.

Dalam Dumairy (1999:157) dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa : $Y = C + I + G + (X - M)$ dimana variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel di sebelah kanan disebut permintaan agregat. Variable G melambangkan pengeluaran pemerintah atau (*Government Expenditures*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta mengamatinya dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dapat pula dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat, tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri.

Menurut Musgrave, dalam suatu proses pembangunan, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sedangkan Menurut Rostow, bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sun'an dan Astuti (2008) menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : pertumbuhan ekonomi dan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat berpengaruh pada kesempatan kerja, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh. Sebaliknya, investasi pada daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB tidak berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja, justru pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kesempatan kerja.

Kesimpulan dari Ramey dan NBER (2012) yang disampaikan pada konferensi "*Fiscal Policy after the Financial Crisis*" di Milan pada Desember 2011 menunjukkan bahwa investasi sector swasta menurun karena kenaikan pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengurangi pengangguran, tetapi bukan karena meningkatnya pegawai swasta tetapi karena meningkatnya pegawai pemerintah

Selaras dengan penelitian Harijono dan Utama (2011) dengan judul " Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi " menyimpulkan bahwa selama periode penelitian, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Namun demikian, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Provinsi lemah. Hal ini karena investasi dan pengeluaran pemerintah lemah dalam memperluas kesempatan kerja pegawai swasta, serta adanya indikasi Provinsi Bali

hanya sebagai pasar dari produk yang diproses di luar Provinsi Bali. Secara langsung, pengeluaran pemerintah berpengaruh kuat terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali, sedangkan secara tidak langsung berpengaruh lemah. Sebaliknya, Investasi berpengaruh lemah terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali, baik langsung maupun tidak langsung sebagai indikasi, pertama, investasi di Provinsi Bali lebih condong ke padat modal; kedua, maraknya investasi tidak produktif, dan ketiga, terjadinya teori dependensi di Provinsi Bali.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Jember. Kajian ini akan mengisi kekosongan literatur yang ada dengan menambah jumlah kasus studi sehingga mencakup wilayah-wilayah lain yang berbeda karakternya. Dalam studi ini, digunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif dengan memecahkan masalah yang terjadi saat ini.

Sebagaimana yang tersebut dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006, bahwa untuk penyelenggaraan ekonomi daerah diperlukan wewenang dan kemampuan pemerintah menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah dari penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam penerapannya, daerah diharuskan mampu mengelola pendapatan daerahnya untuk membiayai berbagai pengeluaran dengan maksud untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cermin bagi kemampuan keuangan daerah yang terwujud dalam kinerja keuangan daerah. Permasalahan yang muncul adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut mampu mencukupi pengeluaran daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan ekonomi. Ditengah tingginya pengeluaran yang dilakukan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat sedikit, pemerintah daerah masih menggantungkan penerimaan dari pemerintah pusat sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah yang

mandiri secara finansial masih jauh dari impian. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi harus dapat dialokasikan pada belanja modal yang tepat terutama penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja juga mampu terserap dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan yang berada dibawah dinas Pekerjaan Umum dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih 22 orang (APBD Kabupaten Jember,2014) dari tingkat pelaksana sampai tenaga teknis. Hal ini memberi pendapatan bagi masyarakat hingga dapat memutar roda perekonomiannya. Kerangka konseptual secara umum dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran, dapat dirumuskan bahwa alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Adapun metode penelitian yang akan dibahas meliputi rancangan penelitian, unit analisis, penentuan daerah penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan rancangan keseluruhan perencanaan dari suatu penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bersifat non eksperimental, sehingga penelitian tidak melakukan percobaan kepada subyek penelitian, akan tetapi hanya ingin mengetahui apakah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum). Penelitian ini di desain sebagai penelitian kuantitatif korelasional karena dalam prosedur dan analisisnya peneliti menggunakan analisis statistik.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinamika pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Jember pada Dinas Pekerjaan Umum dan penyerapan tenaga kerja sejak tahun 2013 dan 2014.

3.3 Daerah Penelitian

Metode penentuan lokasi penelitian yang digunakan adalah *purposive* yaitu tempat penelitian sudah ditentukan dengan sengaja disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember dengan pertimbangan Kabupaten Jember memiliki struktur perekonomian hampir sama dengan struktur perekonomian di kebanyakan Kabupaten di Indonesia yaitu struktur

ekonomi agraris. Disamping itu sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Timur bagian timur, dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Rencana Penelitian

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang akan digunakan dalam operasional penelitian. Untuk menghindari salah pengertian dalam penulisan ini serta meluasnya permasalahan, maka perlu adanya batasan-batasan mengenai variabel yang digunakan, pengertian variabel sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).
- b. Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran yang tak terduga.
- c. Penyerapan tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah jumlah permintaan tenaga kerja baik pria maupun wanita pada seluruh tingkatan pendidikan untuk bekerja pada seluruh lapangan pekerjaan. Dalam penelitian ini penyerapan tenaga kerja tersebut dinyatakan dalam jumlah orang yang terserap dalam berbagai lapangan pekerjaan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini bisa dikelompokkan dalam empat bagian, yakni 1) menurut sifatnya yaitu data kuantitatif, merupakan data yang terbentuk angka, misalnya: jumlah pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja. 2) menurut cara memperolehnya yaitu data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi dari

Dinas Pekerjaan Umum, BPS dan Kantor Bappekap Jember, 3) menurut pengumpulannya yaitu Data berkala (*time series data*), merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian/kegiatan selama periode tersebut misalnya 2013 dan 2014.

3.6 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur. Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan buku dan mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Buku yang digunakan adalah Jember Dalam Angka dari tahun 2013-2014 terbitan Dinas Pekerjaan Umum Jember.

3.7 Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun tahapan analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis garis regresi sederhana sebagai berikut:

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variable-variabel yang diteliti di lapangan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil tabulasi data dan memprosentasikan data yang diperoleh dengan harapan dapat mendukung hasil analisis penelitian serta dapat menjabarkan secara lebih rinci hasil penelitian. Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian akan digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan menurut kategori tertentu dan menguraikan serta menafsirkan untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu kesimpulan.

Jadi analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel bebas yaitu alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum). Hasil penelitian variabel alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja tersebut akan digambarkan menurut kategori tertentu untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu kesimpulan.

3.7.2 Analisis Inferensial

Analisis Inferensial merupakan analisis statistik dengan menggunakan rumus statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

a. Persamaan Garis Regresi Sederhana

Persamaan ini digunakan untuk mencari persamaan garis regresi atau untuk menggambarkan pengaruh variabel bebas (X) yaitu alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Bentuk persamaan analisis garis regresi adalah sebagai berikut:

Rumus:

$$= a + bX + ei$$

(Sugiyono, 2008:270)

Keterangan :

- ei : Kriteria mengenai penyerapan tenaga kerja
- X : Preditor mengenai alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b : Bilangan koefisien regresi
- a : Konstanta
- ei : Variabel yang tidak diteliti

Untuk menyelesaikan persamaan garis regresi di atas, maka harus diketahui koefisien a dan b sebagai berikut:

$$b = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{N(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Sedangkan a adalah bilangan konstan yang dapat diperoleh dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{N}$$

b. Analisis Varian Garis Regresi

Analisis varian garis regresi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya atau tingkat keeratan komponen variabel bebas (alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja). Rumus analisis varian regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$R_y = \sqrt{\frac{a \sum XY}{\sum Y^2}} \quad (\text{Hadi S, 2004:25})$$

Keterangan:

R_y : Koefisien korelasi antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X)

a : Bilangan koefisien prediktor (X)

$\sum XY$: Total variabel X dengan variabel Y

$\sum Y^2$: Total kuadrat variabel

Tabel 3.1 Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 - 0,199	Sangat Rendah
0,200 - 0,339	Rendah
0,400 - 0,599	Cukup Kuat
0,600 - 0,799	Kuat
0,800 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2008:172

c. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja) secara simultan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{\text{reg}} = \frac{R_y^2(1)(N - m - 1)}{m(1 - R_y^2(1))}$$

Keterangan:

- F_{reg} = Harga garis regresi
 R_y = Koefisien korelasi antara X dan Y
 N = Banyaknya responden
 m = Jumlah prediktor
 1 = Bilangan konstan

(Atmaja, 2002:348)

Dari hasil F_{reg} tersebut kemudian dikonsultasikan Ft 5% dengan menggunakan derajat kebebasan (db). Adapun rumus db adalah sebagai berikut:

$$db = \frac{m}{N - m - 1}$$

Kemudian hasil perhitungan (F_{reg}) tersebut dibandingkan dengan F_{tab}

Kesimpulan:

- 1) Jika F_{reg} > F_{tabel}, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (studi kasus pada dinas pekerjaan umum).
- 2) Jika F_{reg} < F_{tabel}, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan lama alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (studi kasus pada dinas pekerjaan umum)

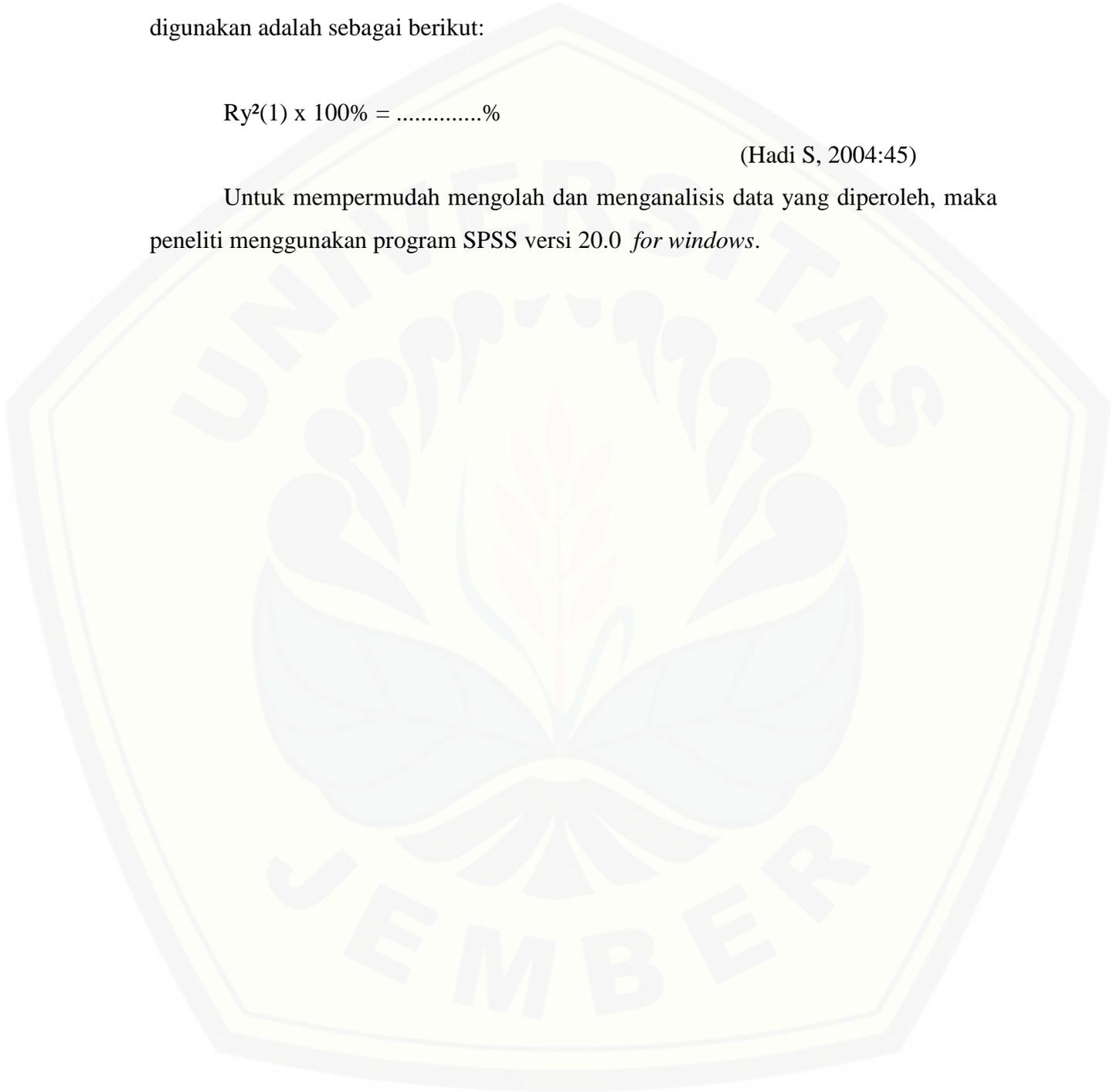
d. Efektifitas garis regresi

Cara ini digunakan untuk mengetahui berapa besar (%) pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$R_y^2(1) \times 100\% = \dots\dots\dots\%$$

(Hadi S, 2004:45)

Untuk mempermudah mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan program SPSS versi 20.0 *for windows*.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis dan dibahas sehingga dapat membuahkan hasil penelitian dan menjelaskan hal-hal yang ingin dijelaskan. Beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian akan disajikan lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember

4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember terletak sekitar 198 km dari ibukota Propinsi Jawa Timur, pada sisi timur-selatan Propinsi Jawa Timur. Sedangkan posisi koordinatnya adalah 7°59'6" sampai 8°33'56" Lintang Selatan dan 6°27'6" sampai 7°14'33" Bujur Timur. Letak Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang disebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi disebelah Timur, dan dengan Samudera Indonesia disebelah Selatan. Kabupaten Jember meliputi wilayah seluas 3.293,34 km², dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan disisi Utara dan Timur serta merupakan dataran subur yang luas kearah Selatan. Kabupaten Jember selain memiliki karakter topografi berbukit serta daratan ternyata juga memiliki sekitar 76 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya belum memiliki nama. Salah satu pulau yang terluas dan berada di Samudera Indonesia adalah pulau Nusa Barong.

Kondisi alam yang berpegunungan dan berbatasan dengan lautan menjadi kelebihan wilayah ini, khususnya berkaitan sektor pariwisata dan potensi sektor kelautan dan perikanan. Beberapa kawasan wisata pantai yang menjadi daya tarik antara lain Pantai Watu Ulo dan Papuma, Pantai Bandealit, Pantai Paseban, Pantai Puger, Pantai Rowo Cangak dan Pulau Nusa Barong. Pantai Puger di Kecamatan Puger adalah kawasan yang selama ini dikenal sebagai lokasi pendaratan ikan yang

cukup besar di kabupaten ini, disamping Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Ambulu dan Tempurejo.

Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan. Dihat dari sisi luas wilayah terluas adalah Kecamatan Tempurejo yang mencapai 524,46 km² dan yang tersempit adalah Kecamatan Kaliwates seluas 24,94 km². Secara terperinci, luas wilayah perkecamatan dan tingkat kemiringannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng

No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah
		0 – 2°	2° – 15°	15°-40°	Diatas 40°	
1	Kencong	65,92	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,56	-	0,75	0,67	82,98
3	Puger	68,60	0,94	24,12	55,34	148,99
4	Wuluhan	92,23	2,01	4,95	38,00	137,18
5	Ambulu	82,55	2,09	8,34	11,58	104,56
6	Tempurejo	84,63	33,22	41,13	365,48	524,46
7	Silo	0,00	89,06	76,81	144,12	309,98
8	Mayang	23,77	15,12	18,71	6,19	63,78
9	Mumbulsari	58,37	15,05	6,71	15,00	95,13
10	Jenggawah	48,55	2,01	-	0,46	51,02
11	Ajung	56,61	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	51,58	1,22	-	-	52,80
13	Balung	47,12	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	70,52	-	-	-	70,52
15	Semboro	43,71	1,72	-	-	45,43
16	Jombang	54,30	-	-	-	54,30
17	Sumberbaru	38,44	54,83	37,97	35,13	166,37
18	Tanggul	27,81	45,81	44,24	82,14	199,99
19	Bangsalsari	54,76	59,62	14,24	46,66	175,28
20	Panti	12,44	36,28	14,83	97,16	160,71
21	Sukorambi	12,94	24,29	2,97	20,43	60,63
22	Arjasa	5,63	13,03	6,98	18,11	43,75
23	Pakusari	26,84	2,27	-	-	29,11
24	Kalisat	8,31	45,03	0,15	-	53,48
25	Ledokombo	3,03	69,75	33,22	40,92	146,92
26	Sumberjambe	10,43	73,50	18,38	35,94	138,24
27	Sukowono	8,98	34,91	0,15	-	44,04

28	Jelbuk	1,02	24,61	9,32	30,11	65,06
29	Kaliwates	22,76	2,18	-	-	24,94
30	Sumbersari	37,05	-	-	-	37,05
31	Patrang	5,03	25,25	5,08	1,64	36,99
	Jumlah	1.205,47	673,76	369,03	1.045,07	3.293,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember 2014

Secara topografis, beberapa kecamatan merupakan hamparan yang relatif datar atau dengan kemiringan antara 0° sampai 2° . Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya adalah Kencong, Ajung, Balung, Umbulsari, Jombang dan Summersari. Sedangkan kecamatan yang sekitar 70% wilayahnya ($365,48 \text{ km}^2$) pegunungan adalah Kecamatan Tempurejo dengan kemiringan rata-rata diatas 40° . Beberapa kecamatan lainnya mempunyai rata-rata elevasi wilayah bervariasi.

Dilihat dari segi ketinggian wilayah, 37,68% atau sebagian besar wilayah kabupaten ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter diatas permukaan laut. Selebihnya, 19,87% pada ketinggian 0 sampai 25 meter, 19,38% 25 sampai 100 meter, dan 15,87% berada pada ketinggian 500 sampai 1000 meter diatas permukaan laut.

Banyaknya aliran sungai yang mengairi kabupaten ini yang berhulu dari kawasan pegunungan yang mengitarinya menjadi salah satu alasan logis mengapa wilayah yang menjadi salah satu lumbung pangan Jawa Timur ini begitu subur. Di kabupaten ini ada 16 daerah aliran sungai (DAS) yang masing-masing DAS terdiri dari beberapa sungai yang kemudian mengairi lahan-lahan pertanian disekitarnya. Sungai yang paling besar dan dikenal adalah Sungai Bedadung yang melintasi ibukota kabupaten dengan panjang 46.875 meter dan mampu mengairi kawasan seluas 93.040 hektar. Sungai ini berada pada DAS Bedadung Hilir. Nemun demikian sungai yang paling panjang adalah Kali Mayang yang berada pada DAS Antirogo yaitu mengalir sejauh 145.500 meter yang mengairi lahan seluas 5.860 hektar.

4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Jember

Struktur pemerintahan di Kabupaten Jember tidak mengalami perubahan. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan yang tersebar dari ujung barat sampai dengan timur. Masing-masing kecamatan membawahi beberapa desa/kelurahan se-Kabupaten Jember. Kecamatan dengan wilayah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Puger, Kalisat dan Sukowono dengan jumlah desa masing-masing sebanyak 12 desa. Kecamatan dengan wilayah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Kencong, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Sukorambi dengan jumlah desa masing-masing sebanyak 5 desa. Begitu juga dengan jumlah dusun yang terbesar di Kabupaten Jember tidak mengalami perubahan, dengan 1000 dusun/lingkungan dimana kecamatan yang memiliki jumlah dusun/ Lingkungan yang sedikit adalah Kecamatan Semboro dengan jumlah dusunnya hanya 14 dusun, Kecamatan Jombang 17 dusun dan Kecamatan Sukorambi sebanyak 16 dusun. Kabupaten Jember mempunyai 4.313 Rukun Warga (RW) dan 15.205 Rukun Tetangga. Kecamatan yang memiliki jumlah rukun warga sedikit adalah Kecamatan Jelbuk sebanyak 61 RW dan Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Pakusari masing-masing mempunyai 65 RW. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) sedikit adalah Kecamatan Jelbuk, jumlahnya adalah 213 RT dan kecamatan yang memiliki jumlah RT paling banyak adalah Kecamatan Silo sebanyak 961 RT.

Keberhasilan suatu daerah sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia para pemimpin daerah tersebut. Salah satu indikator mutu sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Persentase tertinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh para kepala desa/kelurahan adalah SMA (49,80%). Sisanya adalah Diploma/Sarjana sebanyak 29,56% dan SMP sebanyak 20,65%. Tentu saja dengan tingkat pendidikan para kepala desa/kelurahan ini, kemampuan teknis dan non teknis tentang pemerintahan masih perlu ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan daerah.

Tentu saja tugas pemerintahan desa/kelurahan di masing-masing desa/kelurahan tidak dijalankan sendiri oleh para kepala desa/kelurahan tersebut, masing-masing para pemimpin pemerintahan desa/kelurahan tersebut dibantu oleh sekretaris desa/kelurahan (masing-masing berjumlah satu orang) dan beberapa Kepala Urusan (kaur), masing-masing berjumlah 6 kaur, yaitu pemerintahan, Ekbang, Keuangan, Umum, Kesra dan Pamong Tani. Predikat Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur tercermin pada potensi desa/kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan dimana 85% desa/kelurahan berpotensi dibidang pertanian yang sebagian besar berupa persawahan dan ladang. 15% sisanya berpotensi dibidang jasa/perdagangan sebesar 11% dan dibidang industri sebesar 4%.

4.1.3 Penduduk

Data kependudukan sangat penting dan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan pada umumnya dan bidang kesehatan pada khususnya, hampir semua kegiatan pembangunan kesehatan, pendidikan sarana ekonomi obyek sarannya adalah masyarakat atau penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 adalah sebanyak 2,329,929 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.075.916 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 1.111.741 jiwa. (Jember Dalam Angka 2013, BPS Jember)

Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Jember berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2014 (Jiwa)

No	Umur /Th	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	81,475	104,264	185.739
2	5 -9	84,191	106,873	191.064
3	10 - 14	83,929	106,162	190.091
4	15 - 19	107,680	95,842	203.522
5	20 -24	90,331	89,318	179.649
6	25 – 29	104,094	97,621	201.715
7	30 – 34	115,069	71,051	186.120
8	35 – 39	86,265	99,756	186.021
9	40 – 44	68,883	88,369	157.252
10	45 – 49	46,496	82,320	128.816
11	50 – 54	33,836	73,542	107.378
12	55 – 59	15,743	61,443	77.186
13	60 – 64	33,392	44,007	77.399
14	65 +	50,110	65,595	115.705
Jumlah		1.143.766	1,186.163	2.329.929

Sumber data: BPS Jatim, 2014

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sek ratio penduduk wilayah ini adalah sebesar 96.43 artinya 100 penduduk wanita tedapat 96.43 penduduk laki-laki atau penduduk wanita lebih banyak.

Penduduk Kabupaten Jember Hasil Sensus penduduk tahun 1990, 2000 dan 2010 yang diolah oleh BPS Kabupaten Jember menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 1990 berjumlah 2.062.289 jiwa pada tahun 2000 berjumlah 2.187.657 jiwa dan pada tahun 2010 berjumlah 2,329,929 jiwa, angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,612% pertahun.

4.1.3.1 Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan merupakan hal yang penting untuk diketahui karena dengan mengetahui komposisi pekerjaan penduduk dapat diketahui sektor-sektor mana yang berperan dalam perekonomian wilayah lokal, banyaknya penduduk usia 15 tahun

keatas yang bekerja menurut lapangan usaha berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 pada table 4.3 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Lebih yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 (Jiwa)

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petanian	535.944	61.37
2	Penggalian	5.402	0.61
3	Industri Pengolahan	53.672	6.14
4	Listrik dan Air	2.388	0.27
5	Bangunan	43.903	5.02
6	Perdag, Rm dan Hotel	182.175	20.86
7	Angkt dan Komunikasi	39.768	4.55
8	Keuangan	7.593	0.87
9	Jasa-jasa	2.388	0.27
Jumlah		873.233	100.00

Sumber data: BPS Jember, 2014

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Jember yaitu sebesar 61,37%. Ini berarti bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk di Kabupaten Jember bekerja di sektor pertanian, sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Jember merupakan daerah agraris. Sedangkan sektor kedua yang diminati sebagian penduduk Kabupaten Jember adalah di bidang perdagangan, rumah makan dan hotel dengan angka sebesar 20,86%.

4.1.3.2 Pendidikan Penduduk

Keberhasilan suatu daerah sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia. Salah satu indikator mutu sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Banyaknya penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut;

Tabel 4.4 Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, di Kabupaten Jember Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 (Jiwa)

No	Pendidikan tertinggi	Jumlah	%
1	Tidak Tamat SD	826.874	38.52
2	Tamat SD	729.110	33.96
3	Tamat SLTP	283.965	13.23
4	Tamat SLTA	243.019	11.32
5	Tamat D I, II dan III	18.203	0.85
6	Tamat Perguruan Tinggi	45.671	2.13
Jumlah		2.146.842	100.00

Sumber data: BPS Jember, 2014

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dari penduduk usia lebih 5 tahun ke atas dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih rendah hal ini dilihat dari penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 38,52% kemudian tamat SD sebanyak 33.93% kemudian semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berkurang jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tersebut.

4.1.4 Perekonomian

Kabupaten Jember mempunyai potensi dan permasalahan yang menyangkut aspek social dan ekonomi. Kedua aspek tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Jember secara keseluruhan. Pengaruh tersebut terutama yang berkaitan dengan ketergantungan dengan kota-kota lain yang ada disekitarnya. Kondisi ekonomi Kabupaten Jember dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh Kabupaten Jember sendiri. Besarnya PDRB Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012

No	Lapangan Usaha	Rupiah	Persentase (%)
1	Pertanian	5.003.260,26	37.76
2	Pertambangan dan Galian	430.970,11	3.252
3	Industri Pengolahan	1.393.937,30	10.52
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	111.627,07	0.842
5	Bangunan	288.230,12	2.175
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.334.965,87	25.17
7	Pengangkutan dan Komunikasi	610.426,67	4.607
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perush	732.780,77	5.53
9	Jasa-jasa	1.344.781,63	10.15
	Jumlah	13.250.979,79	

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember 2014

Berdasarkan table diatas diketahui PDRB Kabupaten Jember cukup bagus nilainya. Sektor pertanian merupakan penyumbang utama PDRB Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan sektor pertanian paling besar yaitu sebesar 37,76% dari total keseluruhan PDRB. Penyumbang terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 25,17 % dari total keseluruhan PDRB. Penyumbang terkecil PDRB Kabupaten Jember adalah sektor Listrik, Gas dan Air bersih yang besarnya adalah 0,842% dari seluruh jumlah PDRB. Sektor pertanian menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten Jember karena penduduk Kabupaten Jember lebih banyak bekerja di sektor pertanian, selain itu juga Kabupaten Jember mempunyai areal sawah yang cukup luas dan subur terutama di wilayah Kabupaten Jember bagian selatan. Sedangkan sector perdagangan, hotel dan restoran menjadi penyumbang kedua karena Kabupaten Jember mempunyai banyak tempat-tempat wisata yang bagus sehingga dapat menarik

wisatawan untuk datang ke Kabupaten Jember sehingga dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Jember.

4.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dan inferensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan data pokok yang akan dianalisis untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi literatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyerapan tenaga kerja yang akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Hasil deskriptif variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa rekanan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember, aktif dalam pengerjaan kontrak yang telah diberikan atau ditenderkan kepada rekanan, diketahui bahwa pada bulan Januari 2013, CV. Arta Guna yang melakukan kegiatan proyek peningkatan jalan menuju Jembatan Cakang Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp115.867.000.

Pada bulan Februari 2013, CV. Dharma Bhakti Jaya mendapatkan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember untuk melakukan kegiatan peningkatan jalan nusa indah Desa Kertonegoro, dalam hal ini nilai kontrak kerja yang diberikan juga relatif lebih besar sebesar Rp144.161.000. Pada bulan maret diketahui bahwa juga ada kontrak proyek yang diberikan kepada CV. Mahendra Djaya sebesar Rp145.850.000 untuk melakukan kegiatan peningkatan jalan perbatasan Desa Glundengan.

Pada bulan April, ada kontrak yang juga dikeluarkan dan diberikan kepada CV. Bangun Jaya dengan total kontrak sebesar Rp173.625.000, peningkatan yang

terjadi relatif kecil karena besarnya dana alokasi yang dianggarkan lebih banyak digunakan untuk biaya operasional dan material untuk pembangunan jalan yang dilakukan. Pada bulan Mei diketahui bahwa CV. Chandra Jaya menerima kontrak sebesar Rp192.482.000 untuk melakukan peningkatan jalan Darussalam-Jatimulyo. Bulan Juni dilakukan kegiatan peningkatan jalan Darungan Desa Sruni dengan kontrak kerja sebesar Rp192.590.000. CV Rimba Jati mendapatkan kontrak kerja sebesar Rp192.608.000 pada bulan Juli untuk melakukan peningkatan jalan Dusun Klenceng Desa Ajung.

Pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, penerima kontrak kerja dalam bulan ini adalah CV. Mahameru Djaya, CV. Rimba Sakti, CV. Eka Djaya Pratama dan CV. Optimis, dengan besarnya alokasi anggaran yang dianggarkan rata – rata adalah sebesar Rp193.262.000, dan kontrak yang diberikan digunakan untuk melakukan peningkatan jalan menuju Jembatan Gantung Sumberejo pada bulan Agustus, peningkatan jalan Tamansari-Kasiyan pada bulan September, peningkatan jalan Desa Candijati pada bulan Oktober, peningkatan jalan Sucopangepok-Tenap pada bulan September, dan untuk melakukan peningkatan jalan Desa Patemon.

Pada tahun 2014, pengerjaan peningkatan jalan juga diberikan pada CV. Mitra Pilar Agung pada bulan Januari untuk melakukan peningkatan jalan Sumberagung-Tambakrejo, CV. Prima Sentosa pada bulan Februari untuk melakukan peningkatan jalan Langkap-Sumber Gebang, CV. Agung Dharma pada bulan Maret untuk melakukan peningkatan jalan Curah Kalong-Sangrahan, dan CV. Sumber Alam pada bulan April untuk melakukan peningkatan jalan Dusun Karang Kebun Ds. Sumberlesung, dengan nilai kontrak yang diberikan rata-rata adalah sebesar Rp193.758.250.

Pada bulan Mei dan Juni diketahui bahwa CV. Central Karya dan CV. Zidny memperoleh kontrak kerja sebesar Rp193.900.000 dan Rp194.500.000. Pada bulan Juli diketahui bahwa ada 2 kontrak yang diberikan untuk CV. Adhit Karya untuk melakukan peningkatan jalan Sunan Kalijogo Barat Desa Lojejer dan peningkatan

jalan Balai Kampung ke Selatan Dsn. Kepel Desa Lojejer dengan total kontrak sebesar Rp290.200.000. Pada bulan Agustus diketahui bahwa CV. Raung Jaya sebagai penerima kontrak kerja dengan total alokasi dana sebesar Rp290.850.000 untuk melakukan peningkatan jalan Arjasa-Calok dan peningkatan jalan Tegal Gayam Ds. Kemuningsari Kidul.

Pada bulan September juga terdapat 2 kontrak kerja yang dipercayakan kepada CV. Mahameru Jaya Rp385.122.000 untuk melakukan peningkatan jalan Gumelar-Balung dan peningkatan jalan Sahara Desa Kertonegoro. Pada bulan Oktober juga ada 2 kontrak yang dilakukan untuk melakukan peningkatan jalan Klompangan-Pondoklabu dan peningkatan jalan Ikan Kakap RT03 RW09 Kel. Kebonagung, kontrak ini dipercayakan pada CV. Besuki Raya dengan total kontrak sebesar Rp387.450.000. Pada bulan November dan Desember diketahui bahwa CV. Utama Karya sebagai pemegang kontrak kerja yang telah dipercayakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember dengan melakukan kegiatan peningkatan jalan Manggar Al-Qodiri dan jalan Bintoro-Perbal, dan melakukan kegiatan peningkatan jalan Garuda Dsn. Krajan Ds. Glundengan dan melakukan kegiatan peningkatan jalan Dsn. Tanjungsari Glundengan-Nogosari dengan total kontrak sebesar Rp806.025.000.

B. Penyerapan Tenaga Kerja

Data deskriptif didalam penelitian ini merupakan perkembangan peningkatan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember tahun 2013, sebagai berikut adalah hasil perkembangan tingkat kemampuan penyerapan tenaga kerja perbulan pada tahun 2013 yang ada di Kabupaten Jember;



Gambar 4.1 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja pada bulan Januari 2013 adalah sebesar 10 orang tenaga kerja dan pada bulan Februari dan Maret meningkat menjadi 12 orang tenaga kerja. Pada bulan April terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 18 orang tenaga kerja, sedangkan pada bulan Mei, Juni, dan Juli penyerapan tenaga kerja rata – rata adalah sebesar 19 orang. Pada bulan Agustus dan September terjadi penurunan dengan rata – rata penyerapan tenaga kerja sebesar 18 orang tenaga kerja, pada bulan berikutnya yaitu bulan Oktober, November, dan Desember penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan menjadi 20 orang tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan tenaga kerja yang ada relatif meningkat rendah dengan peningkatan pertumbuhan yang relatif tidak berbeda jauh dengan bulan sebelumnya, hal ini terjadi karena peningkatan penyerapan tenaga kerja yang ada, disesuaikan dengan besarnya jumlah kontrak yang diterima, dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam proyek peningkatan jalan.

Data deskriptif didalam penelitian ini merupakan perkembangan peningkatan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember, sebagai berikut adalah hasil perkembangan tingkat kemampuan penyerapan tenaga kerja perbulan pada tahun 2014 yang ada pada di Kabupaten Jember;



Gambar 4.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2014

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan penyerapan tenaga kerja yang di Kabupaten Jember, pada bulan Januari dan Februari, bahwa penyerapan tenaga kerja yang terjadi adalah rata – rata sebanyak 21 orang tenaga kerja, pada bulan maret terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 22 orang sebagai tenaga kerja. Pada bulan April terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 21 orang tenaga kerja. Pada bulan Mei dan Juni terjadi peningkatan yaitu sebanyak 22 orang tenaga kerja. Pada bulan Juli dan Agustus menurun, masing – masing mampu menyerap 14 orang tenaga kerja, sedangkan pada pada bulan September adalah sebesar 17 orang tenaga kerja. Pada bulan bulan Oktober terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu 21 orang tenaga kerja. Pada bulan November dan Desember mengalami peningkatan yang masing-masing

pada setiap bulannya mampu menyerap sebesar 22 orang sebagai tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Kabupaten Jember, dapat terjadi karena adanya kontrak kerja yang telah dianggarkan dan dipercayakan kepada rekanan dalam pembangunan atau peningkatan jalan yang di Kabupaten Jember.

4.2.2 Analisis Inferensial

Analisis ini merupakan analisis statistik dengan menggunakan rumus garis regresi sederhana yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berdasarkan pada data yang diolah melalui angket yang telah disebar. Berikut ini adalah hasil analisis inferensial yang telah dilakukan meliputi:

A. Analisis Garis Regresi Sederhana

Analisis garis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah (X) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (Y). Pada penelitian ini, dilakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 20.0 *for windows*. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6 Hasil Analisis Garis Regresi Sederhana

Variabel Penelitian	Label	Koefisien Regresi
a	Konstanta	8,092
X	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	4,095

Rsquare = 0,797

Multiple R = 0,893^a

F rasio = 110,094

Sumber: Data Primer diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, maka persamaan garis regresi sederhana yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$= 8,092 + 4,095X + e_i$$

Sesuai dengan persamaan regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta = 8,092. Nilai konstanta menunjukkan nilai positif sebesar 8,092. Hal ini menunjukkan apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah dan *ei* nilainya konstan (nol), maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (Y) sebesar 8,092.
2. Nilai koefisien b = 4,095, berarti bahwa apabila nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (X) mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,095 point.

B. Analisis Varian Garis Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya atau untuk mengetahui tingkat keeratan komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah (X) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (Y). Adapun besarnya varian garis regresi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel	R
Pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (X) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (Y)	0,893

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,893 berarti bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (X) memiliki hubungan yang nyata dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (Y). tingkat hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sangat kuat.

C. Uji F

Berdasarkan perhitungan hasil SPSS 20.0 *for windows*, diketahui nilai F_{hitung} sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil SPSS Untuk Uji F

Variabel	F_{hitung}	F_{tabel}	α	Sig. F
X terhadap Y	110,094	4,196	0,05	,000

Sumber: Data Primer (2014), diolah

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa besarnya $F_{hitung} = 110,094 > F_{tabel} = 4,196$ dengan tingkat signifikansi $F = 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun

2013-2014. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu ada pengaruh yang signifikan variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014.

D. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya proporsi sumbangan variabel bebas (X) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Hasil SPSS 20.0 *for windows* diperoleh nilai koefisien determinasi (R_{square}) sebesar 0,797.

$$R_{\text{square}} \times 100\% = 0,797 \times 100\% = 79,7\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya persentase pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 sebesar 79,7%. sedangkan sisanya yaitu 20,3% dipengaruhi variabel bebas lainnya yang tidak diteliti yaitu, upah, nilai produksi, dan nilai investasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Edwita (2012) yang menjelaskan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah, nilai produksi, dan nilai investasi.

4.3 Pembahasan

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Dimana penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam suatu pemilik usaha. Begitu halnya pada pemerintah daerah seperti di Jember. penyerapan tenaga kerja yang ada pada suatu daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja salah satunya yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana tahun anggaran APBD meliputi, masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (studi kasus pada dinas pekerjaan umum). Hal tersebut terbukti dari hasil analisis data yang telah dilakukan, yang mana hasil dari uji F diketahui bahwa variabel bebas anggaran pendapatan dan belanja daerah mempengaruhi variabel terikat (penyerapan tenaga kerja). Dibuktikan dengan hasil perhitungan uji $F_{hitung} = 110,094 > F_{tabel} = 4,196$ dengan tingkat signifikansi $F = 0,000 < \alpha = 0,05$. Berdasarkan analisis koefisien determinasi besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 79,7%.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat, tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri.

Upaya dalam hal perkembangan ekonomi pada pemerintah daerah di Kabupaten Jember membutuhkan beberapa anggaran yang diperuntukkan pada dinas pekerjaan umum. Untuk melaksanakan hal tersebut tentu saja membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kontrak yang telah diberikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 10-22 orang tenaga kerja pada setiap proyek yang dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014

Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (2008:275) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal

yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut dapat mempengaruhi kesempatan kerja/penyerapan tenaga kerja.

Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerja di kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran.

Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran yang tak terduga (Kunarjo, 2002:146)

Hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa bahwa ada pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember dengan arah yang positif. Hal ini mengindikasikan

bahwa dengan adanya pergerakan waktu dan data alokasi anggaran dan belanja daerah yang meningkat maka akan memberikan pengaruh dalam memberikan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cermin bagi kemampuan keuangan daerah yang terwujud dalam kinerja keuangan daerah. Ditengah tingginya pengeluaran yang dilakukan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat sedikit, pemerintah daerah masih menggantungkan penerimaan dari pemerintah pusat sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah yang mandiri secara finansial masih jauh dari impian. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi harus dapat dialokasikan pada belanja modal yang tepat terutama penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja juga mampu terserap dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan yang berada dibawah dinas Pekerjaan Umum dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih 22 orang (APBD Kabupaten Jember, 2014) dari tingkat pelaksana sampai tenaga teknis.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 (studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Jember periode tahun 2013-2014 yaitu sebesar 79,7%. Semakin besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk peningkatan jalan di Kota Jember, maka penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut ;

- a. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan anggaran yang akan dialokasikan untuk melakukan kegiatan peningkatan jalan, diharapkan kontrak kerja yang diberikan mampu memberikan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja;
- b. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengevaluasi kinerja dari rekanan yang telah dipercayakan, diharapkan kontrak kerja yang telah diberikan dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

DAFTAR BACAAN**Buku**

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE)
- Baroroh, Ali. 2013. *Analisis Multivariat dan Time Series*. Gramedia Pustaka : Jakarta
- BPS. 2013. *Jember Dalam Angka*. Jember: BPS Kabupaten Jember
- Devas, 1988 *Kesadaran Budaya Tentang Tata Ruang Di Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Edwinta. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja (http://adwintaactivity.blogspot.com/2012/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi_19.html)
- Fatas A, and Mihov I. 1998. The Effects of Fiscal Policy on Consption and Employment: Theory and Evidence. *Seminar participants at Tilburg University, ECARES, University of Toulouse and The European Summer Symposium on International Macroeconomics* Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Harijono, Gatot Setio dan Utama, I Made Suyana (2011), *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Bali. FE Udayana Bali
- Irawan, dan Suparmoko. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Yogya : Liberty.
- Iwan, 1994, Aziz., *Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LP FEUt.
- Kunarjo, 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta : UI Press.
- Kuncoro, Mudrajad 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Machmud, Sofyan. 2003. *Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan*. Thesis. PPS Universitas Sriwijaya Palembang. McEachem,

- Mursinto, Djoko, 2005, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Disertasi, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- Musgrave Richard A, and Musgrave, Peggy B, 1980. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapura : International Student Edition, Third Edition, Mc Graw Hill International Book Company..
- Prassman, 2000. : *Statistika. Analisis Nubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Nusantara
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. MediaKom, Yogyakarta
- Ramey, V.A. 2012. Government Spending and Private Activity. *This is revised version The NBER conference "Fiscal Policy after The Financial Crisis" in Milan in December 2011*
- Simanjuntak, Payaman, 1999, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Edisi 2001, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1948. *Pe.:ngantar Teori lviakroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Fersada.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Pengantar Teori Ekonomi Makroekonomi*. Jakarta : LPFE Universitas Indonesia.
- Sumanto, 1995, Kausalitas Antara Ekspor dan PDB di Indonesia, 1971-1997. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol XLVII No. 3. Suharto. Apakah terdapat Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Asing Langsung? *Jurnal Ekoraomi Univ. Krisna Dwipayana*.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Rakyat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sun'an Muammil & Astuti Endang. 2008. *Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Vol. 1 No. 1 : Iqtishodunia
- Supranto. 1995. *Ekonometrik*. Yogyakarta: BPFE.

Surahmad, 1990, . *Materi Pokok Ekonomi Regional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Tarigan, 2005, *Modern Econometric: An Introduction*. London: AddisonFJesley Longman.

Todaro, 2003, , *Economics Develop ment in The Third World*, Fourth Edi tion, New York: Longman Group Ltd.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember Periode 2013-2014 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum)	Adakah pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember?	Variabel Bebas: Alokasi APBD (X) Variabel Terikat: Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Jumlah tenaga kerja yang terserap pada peningkatan infrastruktur jalan selama tahun 2013-2014	1. Data Sekunder: Jember Dalam Angka tahun 2013-2014 pada data keuangan dan kependudukan 2. Bahan Rujukan: buku, jurnal dan literatur lain terkait	1. Jenis penelitian : Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 2. Metode penentuan lokasi penelitian menggunakan <i>purposive area</i> 3. Metode Pengumpulan data menggunakan studi literatur 4. Metode Analisis Data a. Analisis garis regresi $= a + bX + ei$ b. Analisis varian garis regresi a) $R_{y(1)} = \frac{a \sum xy}{\sqrt{\sum y^2}}$ b) Uji F $F_{reg} = \frac{R_y^2(1)(N - m - 1)}{m(1 - R_y^2(1))}$ c) Efektifitas Regresi $R_{y^2(1)} \times 100\% = \dots\dots\dots\%$	Alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember

Lampiran B

HASIL DATA SEKUNDER

No.	REKANAN	BULAN (TAHUN)	KONTRAK (Rp)	ALOKASI ANGGARAN	TENAGA KERJA
1	CV. ARTA GUNA	Jan-13	Rp115.867.000	Rp115.867.000	10
2	CV. DHARMA BAKTI JAYA	Feb-13	Rp144.161.000	Rp144.161.000	12
3	CV. MAHENDRA JAYA	Mar-13	Rp145.850.000	Rp145.850.000	12
4	CV. BANGUN JAYA	Apr-13	Rp173.625.000	Rp173.625.000	18
5	CV. CANDRA JAYA	Mei-13	Rp192.482.000	Rp192.482.000	19
6	CV. AF JAYA	Jun-13	Rp192.590.000	Rp192.590.000	19
7	CV. RIMBA JAYA	Jul-13	Rp192.608.000	Rp192.608.000	19
8	CV. MAHAMFRU JAYA	Agu-13	Rp193.042.000	Rp193.042.000	18
9	CV. RIMBA JAYA	Sep-13	Rp193.075.000	Rp193.075.000	18
10	CV. EKA JAYA PRATAMA	Okt-13	Rp193.226.000	Rp193.226.000	20
11	CV. OPTIMIS	Nov-13	Rp193.253.000	Rp193.253.000	20
12	CV. DUA SAUDARA	Des-13	Rp193.715.000	Rp193.715.000	20
13	CV. MITRA PILAR AGUNG	Jan-14	Rp193.725.000	Rp193.725.000	21
14	CV. PRIMA SENTOSA	Feb-14	Rp193.750.000	Rp193.750.000	21
15	CV. AGUNG DHARMA	Mar-14	Rp193.758.000	Rp193.758.000	22
16	CV. SUMBER ALAM	Apr-14	Rp193.800.000	Rp193.800.000	21

Lampiran B

No.	REKANAN	BULAN (TAHUN)	KONTRAK (Rp)	ALOKASI ANGGARAN	TENAGA KERJA
17	CV. SENTRAL KARYA	Mei-14	Rp193.900.000	Rp193.900.000	22
18	CV. ZIDNY	Jun-14	Rp194.500.000	Rp194.500.000	22
19	CV. ADHIT KARYA	Jul-14	Rp135.000.000	Rp135.000.000	14
20	CV. ADHIT KARYA		Rp155.200.000	Rp155.200.000	14
21	CV. RAUNG JAYA RAYA	Agu-14	Rp130.000.000	Rp130.000.000	14
22	CV. RAUNG JAYA RAYA		Rp160.850.000	Rp160.850.000	14
23	CV. MAHAMERU JAYA	Sep-14	Rp175.122.000	Rp175.122.000	17
24	CV. MAHAMERU JAYA		Rp210.000.000	Rp210.000.000	17
25	CV. BESUKI RAYA	Okt-14	Rp215.000.000	Rp215.000.000	21
26	CV. BESUKI RAYA		Rp202.084.000	Rp202.084.000	21
27	CV. UTAMA KARYA	Nov-14	Rp187.450.000	Rp187.450.000	22
28	CV. UTAMA KARYA		Rp200.000.000	Rp200.000.000	22
29	CV. UTAMA KARYA	Des-14	Rp207.500.000	Rp207.500.000	22
30	CV. UTAMA KARYA		Rp211.075.000	Rp211.075.000	22
					554

No	Rekanan	Bulan (Tahun)	Jenis Kegiatan
1	CV. ARTA GUNA	Jan-13	Peningkatan Jalan menuju Jembatan Cakang Mandiri
2	CV. DHARMA BAKTI JAYA	Feb-13	Peningkatan Jalan Nusa Indah Desa Kertonegoro
3	CV. MAHENDRA JAYA	Mar-13	Peningkatan Jalan Perbatasan Desa Glundengan
4	CV. BANGUN JAYA	Apr-13	Peningkatan Jalan Ledokombo-Cumedak
5	CV. CANDRA JAYA	Mei-13	Peningkatan Jalan Darussalam-Jatimulyo
6	CV. AF JAYA	Jun-13	Peningkatan Jalan Darungan Desa Sruni
7	CV. RIMBA JATI	Jul-13	Peningkatan Jalan Dusun Klenceng Desa Ajung
8	CV. MAHAMERU JAYA	Agu-13	Peningkatan Jalan menuju Jemb. Gantung Sumberejo
9	CV. RIMBA JATI	Sep-13	Peningkatan Jalan Tamansari-Kasiyan
10	CV. EKA JAYA PRATAMA	Okt-13	Peningkatan Jalan Desa Candijati
11	CV. OPTIMIS	Nov-13	Peningkatan Jalan Sucopangepok-Tenap
12	CV. DUA BERSAUDARA	Des-13	Peningkatan Jalan Desa Patemon
13	CV. MITRA PILAR AGUNG	Jan-14	Peningkatan Jalan Sumberagung-Tambakrejo
14	CV. PRIMA SENTOSA	Feb-14	Peningkatan Jalan Langkap-Sumber Gebang
15	CV. AGUNG DHARMA	Mar-14	Peningkatan Jalan Curah Kalong-Sanggrahan
16	CV. SUMBER ALAM	Apr-14	Peningkatan Jalan Dusun Karang Kebun Ds. Sumberlesung
17	CV. CENTRAL KARYA	Mei-14	Peningkatan Jalan Dsn. Tanjungsari Glundengan-Nogosari
18	CV. ZIDNY	Jun-14	Peningkatan Jalan Sedap Malam Dsn Tanjungsari Ds Glundengan
19	CV. ADHIT KARYA	Jul-14	Peningkatan Jalan Sunan Kalijogo Barat Desa Lojejer
20	CV. ADHIT KARYA		Peningkatan Jalan Balai Kampung ke Selatan Dsn. Kepel Desa Lojejer
21	CV. RAUNG JAYA RAYA	Agu-14	Peningkatan Jalan Gumelar-Balung
22	CV. RAUNG JAYA RAYA		Peningkatan Jalan Sahara Desa Kertonegoro
23	CV. MAHAMERU JAYA	Sep-14	Peningkatan Jalan Gumelar-Balung
24	CV. MAHAMERU JAYA		Peningkatan Jalan Sahara Desa Kertonegoro
25	CV. BESUKI RAYA	Okt-14	Peningkatan Jalan Klompangan-Pondoklabu
26	CV. BESUKI RAYA		Peningkatan Jalan Ikan Kakap RT03 RW09 Kel. Kebonagung
27	CV. UTAMA KARYA	Nov-14	Peningkatan Jalan Manggar Al-Qodiri
28	CV. UTAMA KARYA		Peningkatan Jalan Bintoro-Perbal
29	CV. UTAMA KARYA	Des-14	Peningkatan Jalan Garuda Dsn. Krajan Ds. Glundengan
30	CV. UTAMA KARYA		Peningkatan Jalan Dsn. Tanjungsari Glundengan-Nogosari

HASIL ANALISIS GARIS REGRESI SEDERHANA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penyerapan Tenaga Kerja	18,4667	3,55967	30
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2,5333	,77608	30

Correlations

		Penyerapan Tenaga Kerja	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pearson Correlation	Penyerapan Tenaga Kerja	1,000	,893
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	,893	1,000
Sig. (1-tailed)	Penyerapan Tenaga Kerja	.	,000
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	,000	.
N	Penyerapan Tenaga Kerja	30	30
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	30	30

Variables Entered/Removed^p

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,893 ^a	,797	,790	1,63125	,797	110,094	1	28	,000	1,602

a. Predictors: (Constant), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	292,959	1	292,959	110,094	,000 ^a
	Residual	74,508	28	2,661		
	Total	367,467	29			

a. Predictors: (Constant), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,092	1,033		7,836	,000					
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4,095	,390	,893	10,493	,000	,893	,893	,893	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1	1	1,958	1,000	,02	,02
	2	,042	6,787	,98	,98

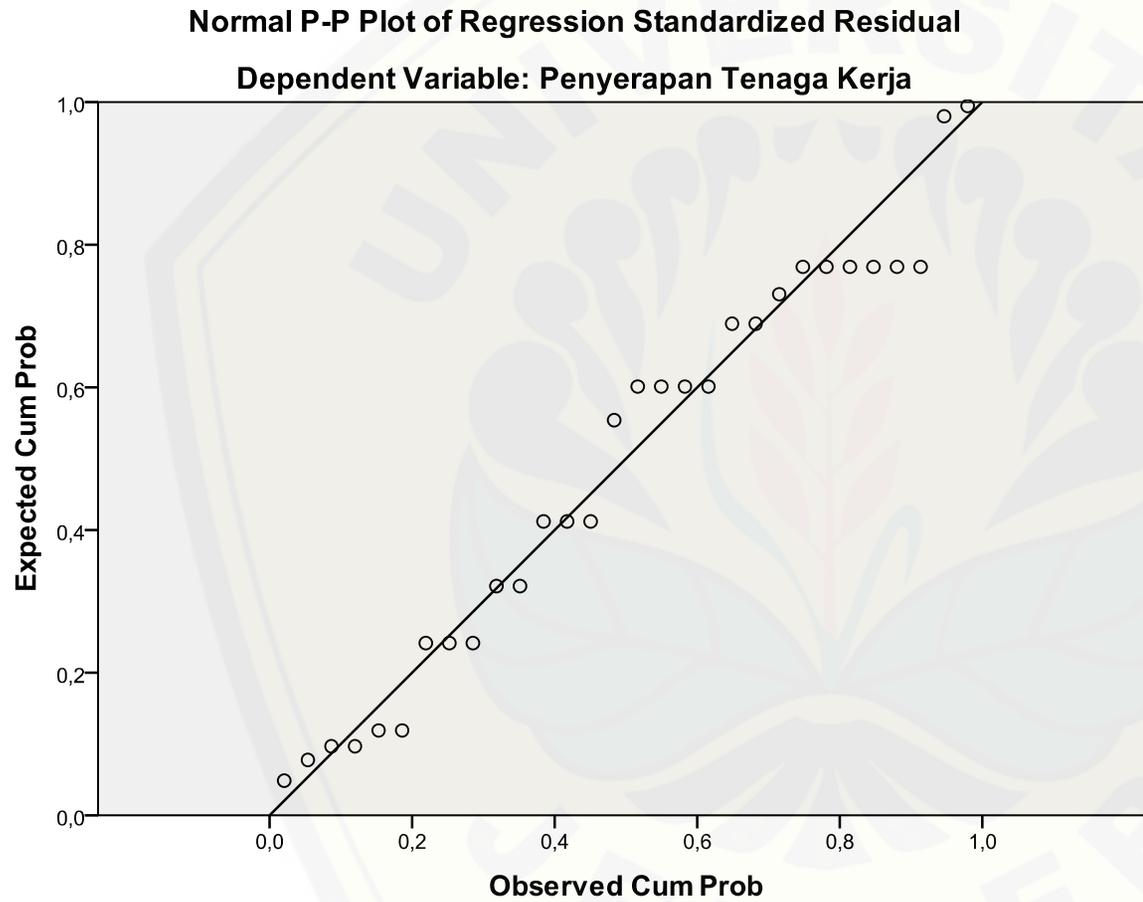
a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

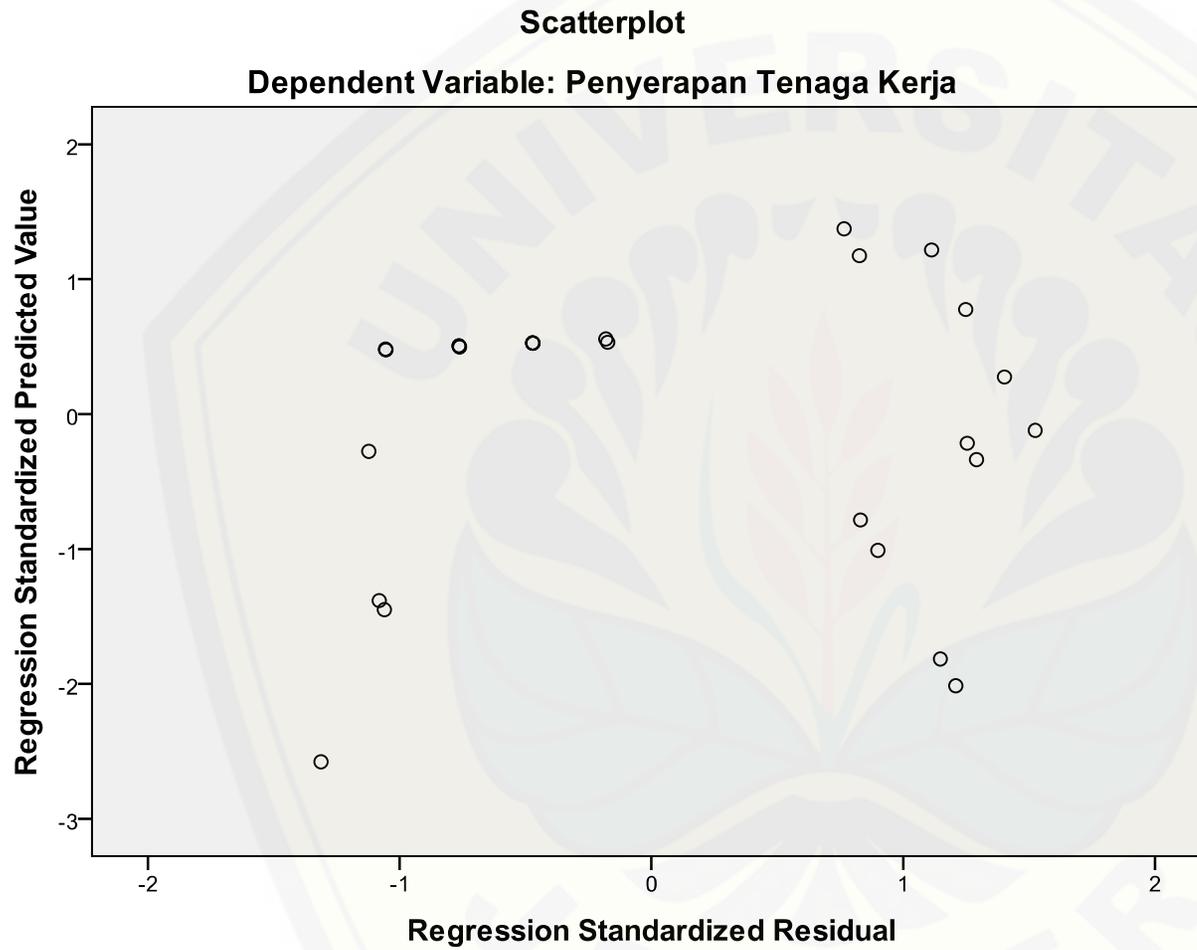
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	12,1870	20,3779	18,4667	3,17837	30
Residual	-3,37786	1,81298	,00000	1,60288	30
Std. Predicted Value	-1,976	,601	,000	1,000	30
Std. Residual	-2,071	1,111	,000	,983	30

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Charts





TABEL
Nilai-nilai Kritis F
untuk tingkat kepercayaan 95 %, alpha = 0.05

df2	df 1				
	1	2	3	4	5
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2
2	18.51	19	19.16	19.25	19.3
3	10.13	9.552	9.277	9.117	9.013
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.05
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387
7	5.591	4.737	4.347	4.12	3.972
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204
12	4.747	3.885	3.49	3.259	3.106
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025
14	4.6	3.739	3.344	3.112	2.958
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.81
18	4.414	3.555	3.16	2.928	2.773
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.74
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711
21	4.325	3.467	3.072	2.84	2.685
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.64
24	4.26	3.403	3.009	2.776	2.621
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587
27	4.21	3.354	2.96	2.728	2.572
28	4.196	3.34	2.947	2.714	2.558
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545
30	4.171	3.316	2.922	2.69	2.534
31	4.16	3.305	2.911	2.679	2.523
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503
34	4.13	3.276	2.883	2.65	2.494
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485

Lampiran E

36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.47
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449
41	4.079	3.226	2.833	2.6	2.443
42	4.073	3.22	2.827	2.594	2.438
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422
46	4.052	3.2	2.807	2.574	2.417
47	4.047	3.195	2.802	2.57	2.413
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404
50	4.034	3.183	2.79	2.557	2.4
51	4.03	3.179	2.786	2.553	2.397
52	4.027	3.175	2.783	2.55	2.393
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389
54	4.02	3.168	2.776	2.543	2.386
55	4.016	3.165	2.773	2.54	2.383
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.38
57	4.01	3.159	2.766	2.534	2.377
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371
60	4.001	3.15	2.758	2.525	2.368
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366
62	3.996	3.145	2.753	2.52	2.363
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361
64	3.991	3.14	2.748	2.515	2.358
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352
68	3.982	3.132	2.74	2.507	2.35
69	3.98	3.13	2.737	2.505	2.348
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342
73	3.972	3.122	2.73	2.497	2.34
74	3.97	3.12	2.728	2.495	2.338
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335

Lampiran E

77	3.965	3.115	2.723	2.49	2.333
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332
79	3.962	3.112	2.72	2.487	2.33
80	3.96	3.111	2.719	2.486	2.329
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324
84	3.955	3.105	2.713	2.48	2.323
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319
88	3.949	3.1	2.708	2.475	2.318
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313
93	3.943	3.094	2.703	2.47	2.312
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311
95	3.941	3.092	2.7	2.467	2.31
96	3.94	3.091	2.699	2.466	2.309
97	3.939	3.09	2.698	2.465	2.308
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305

Surat Ijin Observasi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Letjen S. Parman No. 89 Telp. 337853 Jember



Kepada
 Yth. Sdr. : 1. Kepala Bappekab. Jember
 2. Kepala Disnakertrans Kab. Jember
 3. Kepala DPU Pengairan Kab. Jember
 Di -
 JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/955/314/2014

Tentang

IJIN OBSERVASI

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat dari FKIP Universitas Jember tanggal 05 Mei 2014 Nomor : 3456/UN25.1.5/LT/2014

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / No. Induk : Novianti Drianing Ritama 100210301066
- Instansi / Fak : Prodi Pend. Ekonomi / FKIP Universitas Jember.
- Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
- Kepentingan : Melaksanakan Penelitian Tentang : " Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember "
- Lokasi : Bappekab, Disnaker Transmigrasi dan DPU Bima Kabupaten Jember.
- Tanggal : 06-05-2014 s/d 06-06-2014

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperti yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Observasi ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 06-05-2014

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER



Drs. WIDI PRASETYO, M.Pd
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19610081982011005

- Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Dekan FKIP Universitas Jember
 2. Arsip

Surat Ijin Penelitian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: 0331-334988, 330738 Fax: 0331-334988
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor : 8048/UN25.1.5/LT/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 JUL 2014

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jember

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini.

Nama : Novianti Dianing Risma
NIM : 100210301066
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Instansi yang Saudara pimpin dengan Judul: "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember Tahun 2004-2013".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Sukatman, M.Pd
NIP 19640123 199512 1 001

Surat Ijin Penelitian Badan Pusat Statistik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: 0331-334988, 330738 Fax: 0331-334988
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor : 7912/UN25.1.5/LT/2014
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 DEC 2014

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini.

Nama : Novianti Dianing Risma
NIM : 100210301066
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Instansi yang Saudara pimpin dengan Judul: "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember Tahun 2004-2013".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Sukatman, M.Pd
NIP. 19640123 199512 1 001

Surat Ijin Penelitian Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten
JemberKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telepon: 0331-334988, 330738 Fax: 0331-334988

Laman: www.fcip.unej.ac.id

Nomor : 8049/UN25.1.5/LT/2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 DEC 2014

Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini.

Nama : Novianti Dianing Risma

NIM : 100210301066

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Instansi yang Saudara pimpin dengan Judul: "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember Tahun 2004-2013".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Dekan
Dekan I,Dr. Sukatman, M.Pd
NIP 19640123 199512 1 001

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jalan Dewi Sartika No. 2 ☎ 486537 Jember

SURAT - KETERANGAN
Nomor : 800/ /2015 /35.09.415/2015

Sehubungan surat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Nomor : 804/UN.25.1.5/2014 tanggal 01 Desember 2014 perihal permohonan ijin penelitian, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

N a m a : NOVIANTI DIANING RISMA
N I M : 1002 1030 1066
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Ekonomi
A l a m a t : Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember tentang "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember Tahun 2013 - 2014" terhitung mulai tanggal 04 Desember 2014 s/d 12 Januari 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 MAR 2015

an Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KABUPATEN JEMBER
Sekretaris


Drs. DITO SUDARTONO
Pembina Tk. I
NIP. 19601007 198908 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Alamat: Jl. Kalimantan 32 Kampus Tegal Boro Kotak Pos 162 Telp/Fax 0331-354088 Jember 68121

LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novianti Daming Risma
 Nim / Angkatan : 100210301066 / 2010
 Jurusan / Prog.Studi : Pendidikan IPS / Pendidikan Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember Tahun 2009-2013
 Dosen Pembimbing I : Drs. Pudjo Sulharso, M. Si
 Dosen Pembimbing II : Drs. Djoko Widodo, M.M

KEGIATAN BIMBINGAN

No.	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	TT. Pembimbing
			Pembimbing I
1.	4 April 2014	Judul	1. <i>[Signature]</i>
2.	20 Sept 2014	BAB I, II, III	2. <i>[Signature]</i>
3.	22 Sept 2014	Revisi BAB I, II, III	3. <i>[Signature]</i>
4.	23 Sept 2014	ACC Seminar	4. <i>[Signature]</i>
5.	17 Nov 2014	Revisi Seminar	5. <i>[Signature]</i>
6.	10 Dec 2014	BAB IV, V	6. <i>[Signature]</i>
7.	15 Januari 2015	BAB IV, V	7. <i>[Signature]</i>
8.	18 Februari 2015	BAB VI, VII	8. <i>[Signature]</i>
9.	20 Februari 2015	BAB VIII, IX	9. <i>[Signature]</i>
10.	3 Maret 2015	BAB X, XI	10. <i>[Signature]</i>
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Catatan :

- Lembar ini harus dibawa dan di isi setiap melakukan konsultasi.
- Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Alamat: Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegul Boto Kutuk Pos 162 Telp/fax 0331-334988 Jember 68121

LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novianti Dianing Risma
 Nim / Angkatan : 100210301066 / 2010
 Jurusan / Prog.Studi : Pendidikan IPS / Pendidikan Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember Periode Tahun 2009-2013
 Dosen Pembimbing I : Drs. Pudjo Suharso, M. Si
 Dosen Pembimbing II : Drs. Djoko Widodo, M.M

KEGIATAN BIMBINGAN

No.	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	TT. Pembimbing	
			I	II
1.	2 April 2014	Judul	1.	1.
2.	19 Sept' 2014	BAB I, II, III	2.	2.
3.	29 Sept 2014	ACC Seminar	3.	3.
4.	19 Nov 2014	Perini Seminar	4.	4.
5.	10 Des 2014	BAB IV, 2	5.	5.
6.	24 Februari 2015	BAB IV, 3	6.	6.
7.	4 Maret 2015	Uji Ujian Skripsi	7.	7.
8.			8.	8.
9.			9.	9.
10.			10.	10.
11.			11.	11.
12.			12.	12.
13.			13.	13.
14.			14.	14.
15.			15.	15.

Catatan :

1. Lembar ini harus dibawa dan di isi setiap melakukan konsultasi.
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas**

1. Nama : Novianti Dianing Risma
2. Tempat, tanggal lahir : Jember, 31 Oktober 1991
3. Agama : Islam
4. Nama Ayah : Rujito
5. Nama Ibu : Tutik
6. Alamat Asal : Jalan Hos Cokroaminoto 1/Blok 2 Lingk.Kulon Pasar
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

B. Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1.	SD Negeri Kepatihan 2 Jember	Jember	2004
2.	SMP Negeri 6 Jember	Jember	2007
3.	SMA Muhammadiyah 3 Jember	Jember	2010

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sujarwo,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan TA.2011

Lampiran K



Gambar 3. Peningkatan Jalan Klompangan-Pondoklabu Kecamatan Ajung oleh CV. Besuki Raya



Gambar 4. Peningkatan Jalan Darungan Desa Sruni Kecamatan Jenggawah oleh CV. Candra Jaya

Lampiran K



Gambar 5. Peningkatan Jalan Nusa Indah Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah oleh CV. Dharma Bakti Jaya



Gambar 6. Peningkatan Jalan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah oleh CV. Bangun Karya

Lampiran K



Gambar 7. Peningkatan Jalan Manggar Al-Qodiri Kecamatan Patrang oleh CV. Rifa Maflana



Gambar 8. Peningkatan Desa Candijati Kecamatan Arjasa oleh CV. Rimba Jati